



Rancangan Renstra Dinas Sosial  
Kabupaten Mamuju 2025-2030

## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2030 ini dapat diselesaikan dan disajikan sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.

Renstra ini disusun sebagai bagian dari upaya sistematis Dinas Sosial dalam mendukung visi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berdaya. Selama periode lima tahun ke depan, seluruh program dan kegiatan yang dirancang oleh Dinas Sosial diarahkan untuk mencapai satu tujuan utama: meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan, miskin, dan terpinggirkan.

Dokumen ini mengintegrasikan berbagai kebijakan nasional dan daerah, termasuk RPJMN 2025–2029, RPD Kabupaten Mamuju, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang sosial. Selain itu, Renstra ini juga mengadopsi pendekatan berbasis kinerja melalui pohon kinerja, indikator SMART, dan cascading program, serta mengarusutamakan perspektif gender dan inklusi sosial dalam setiap tahapan perencanaan.

Penyusunan Renstra ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan strategis yang kokoh bagi Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong transformasi sosial menuju Mamuju yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Mamuju, 14 Oktober 2025

Kepala Dinas,



**IKHSAN LASAMI, ST.MM**  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP.197008282001121007

## Daftar Tabel

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	19
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon.....	19
3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	20
4. Jumlah PSKS Tahun 2025.....	20
5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan.....	21
6. Jumlah Pegawai (PTT) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	22
7. Jumlah Sarana Prasarana Dinas Sosial Kab. Mamuju.....	22
8. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	23
9. Kelompok Sasaran Layanan.....	37
10. Mitra Perangkat Daerah.....	38
11. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja.....	39
11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
11. Kerja Sama yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	40
12. Permasalahan.....	41
13. Isu Strategis.....	42
14. Cascading.....	46
15. Penentuan Strategi.....	48
16. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	50
17. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah.....	53
18. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	55
19. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	76
21. Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	87
22. Indikator Kinerja Utama.....	89
23. Indikator Kinerja Kunci.....	91

## Daftar Lampiran

Lampiran	Halaman
1.Bagan Sruktur Dinas Sosial.....	18

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	2
<b>Daftar Tabel</b> .....	3
<b>Daftar Lampiran</b> .....	4
<b>Daftar Isi</b> .....	5
<b>BAB I</b> .....	6
<b>PENDAHULUAN</b> .....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b> .....	1
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN</b> .....	1
<b>ISU STRATEGIS OPD</b> .....	1
2.1 Gambaran Pelayanan .....	1
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	1
2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....	8
2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	71
2.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	71
2.1.5 Kelompok Sasaran Kinerja.....	70
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah .....	71
2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah .....	71
2.1.8 Kerjasama.....	72
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .....	73
2.2.1 Permasalahan.....	73
2.2.2 Isu Strategis .....	71
<b>BAB III</b> .....	1
<b>TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	1
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	1
3.2 Penentuan Strategi.....	3
3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	5
3.4 Tabel Pentahapan Renstra Perangkat Daerah .....	8
<b>BAB IV</b> .....	1
<b>PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN</b> <b>BIDANG URUSAN</b> .....	1
4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	2
4.2 Tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	23
4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	34
4.4 Indikator Kinerja Utama .....	36
4.5 Indikator Kinerja Kunci .....	38
<b>BAB V</b> .....	39
<b>PENUTUP</b> .....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down. Hal ini berarti bahwa perencanaan daerah disamping diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, juga diharapkan munculnya rasa kepemilikan rencana (sense of ownership). Keterlibatan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal dalam pengimplementasiannya.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagi Daerah tahun 2025-2029, menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota untuk memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses

penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 ditetapkan oleh Bupati Mamuju dengan Peraturan Kepala Daerah dan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2025 - 2029 serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025-2029. Dalam proses penyusunannya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju juga telah memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Renstra sebelumnya tahun 2021-2024, isu yang berkembang, kebijakan provinsi dan kebijakan nasional dibidang Urusan Sosial.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 ini dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja sebagai salah satu perjanjian kinerja yang harus dilaporkan sebagai pertanggung-jawaban Kepala Dinas Sosial kepada Bupati Mamuju dan Masyarakat Kabupaten Mamuju. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju juga merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra**

RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2025–2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - 10) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - 11) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - 12) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - 16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
  - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  - 22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
  - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039;
  - 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045; dan
  - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk menerjemahkan dan mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 dengan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun tujuan penyusunan Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju adalah:

- a. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan kesehatan jangka menengah dan pendek Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju beserta unit perangkat teknisnya.
- b. Menjadi parameter untuk mengukur tingkat kinerja Dinas Kesehatan beserta unit perangkat teknisnya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah bidang kesehatan.
- c. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan

- kesehatan di Dinas Kesehatan dan unit perangkat teknisnya.
- d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang ;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber daya Perangkat Daerah
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksi)
  - d. Kelompok sasaran layanan
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat :
  - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Isu strategi

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat :

- a. Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
- b. Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
- c. Strategi Perangkat daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
- d. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat:

- a. Uraian Program;

- b. Uraian Kegiatan;
- c. Uraian sub.kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
- d. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- e. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- f. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting, substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS OPD**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan**

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
2. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27 tahun 2016 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah dinas sosial kabupaten mamuju.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kedudukan Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Sosial.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang sosial;
- b. melaksanakan kebijakan di Bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang sosial;
- d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan, Bidang perlindungan dan jaminan sosial, Bidang rehabilitasi sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok;
  - b. perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan, Bidang perlindungan dan jaminan sosial dan Bidang rehabilitasi sosial;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan teknis dalam Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan, Bidang perlindungan dan jaminan sosial, Bidang rehabilitasi sosial;
  - b. merumuskan rencana strategis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan, Bidang perlindungan dan jaminan sosial, Bidang rehabilitasi sosial berdasarkan visi misi pemerintah daerah sebagai acuan kerja;
  - c. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai Bidang tugasnya agar terjalin kerja sama dalam pelaksanaan tugas;
  - d. mengorganisasikan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas;
  - e. membimbing dan mengarahkan sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
  - g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
  - h. menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang rehabilitasi sosial, distribusi dan pemberdayaan sosial dan kemiskinan serta bantuan dan perlindungan sosial;
  - i. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
  - j. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - k. membina pelaksanaan pengawasan melekat di Bidang sosial;
  - l. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkup Dinas;
  - m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Huruf b dipimpin oleh mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

- (II) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan rencana program dan kegiatan anggaran Dinas;
  - b. penyelenggaraan kebijakan, pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, perencanaan dan evaluasi, keuangan dan kepegawaian; dan
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub Bagian.
- (III) Untuk kelancaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kebijakan di sekretariat pada lingkup tugas sub keuangan dan kepegawaian dan pada sub koordinator umum, perencanaan dan evaluasi;
  - b. merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup sekretariat sebagai acuan kerja;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Bidang lain di lingkup Dinas;
  - d. membagi pelaksanaan tugas meliputi urusan umum, perencanaan dan evaluasi, keuangan dan kepegawaian Kepada Sub Bagian dan sub koordinator guna kelancaran tugas;
  - e. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada sub Bagian dan sub koordinator guna kelancaran tugas;
  - f. mengevaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
  - g. menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di lingkup sekretariat;
  - h. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
  - i. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
  - j. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, Renstra, dan RENJA dan/atau perencanaan peraturan sesuai dengan kewenangan dinas;
  - k. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - l. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan peningkatan karier; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan
3. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 334 ayat (1) huruf c dan ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan merencanakan, mengoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas sesuai dengan kewenangan pada sub urusan pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) untuk kelancaran tugas Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan;
  - b. menyelenggarakan program dan kegiatan di Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan; dan
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kebijakan di Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan yang

- meliputi urusan pemberdayaan sosial, lembaga sosial, perorangan, keluarga dan lembaga kemiskinan dan keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial sebagai pedoman kerja;
- b. merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan yang meliputi urusan pemberdayaan sosial, lembaga sosial perorangan, kelurgadan lembaga masyarakat, penanganan fakir miskin dan pengolahan data kemiskinan dan keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial sebagai pedoman kerja;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan Kepala Bidang lain di lingkup Dinas sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. membagi pelaksanaan tugas meliputi urusan pemberdayaan sosial, lembaga sosial, perorangan, keluarga dan lembaga masyarakat, penanganan fakir miskin dan pengolahan data kemiskinan dan keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi guna kelancaran tugas;
  - f. melaksanakan kebijakan di Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan sebagai pedoman kerja;
  - g. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan;
  - h. melaksanakan program kegiatan Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan sebagai pedoman kerja;
  - i. melaksanakan persiapan bahan program kegiatan Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan;
  - j. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang pemberdayaan sosial dan kemiskinan melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan;
  - k. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah pada Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan;
  - l. melaksanakan persiapan bahan koordinasi dengan pihak terkait pada bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan yang meliputi urusan pemberdayaan sosial, lembaga sosial, perorangan, keluarga dan lembaga masyarakat, penanganan fakir miskin dan pengolahan data kemiskinan dan keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial sebagai pedoman kerja;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan;
  - n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
4. Bidang perlindungan dan jaminan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat
- (1) huruf d dan ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
- Untuk kelancaran tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - b. menyelenggarakan program dan kegiatan di Bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan

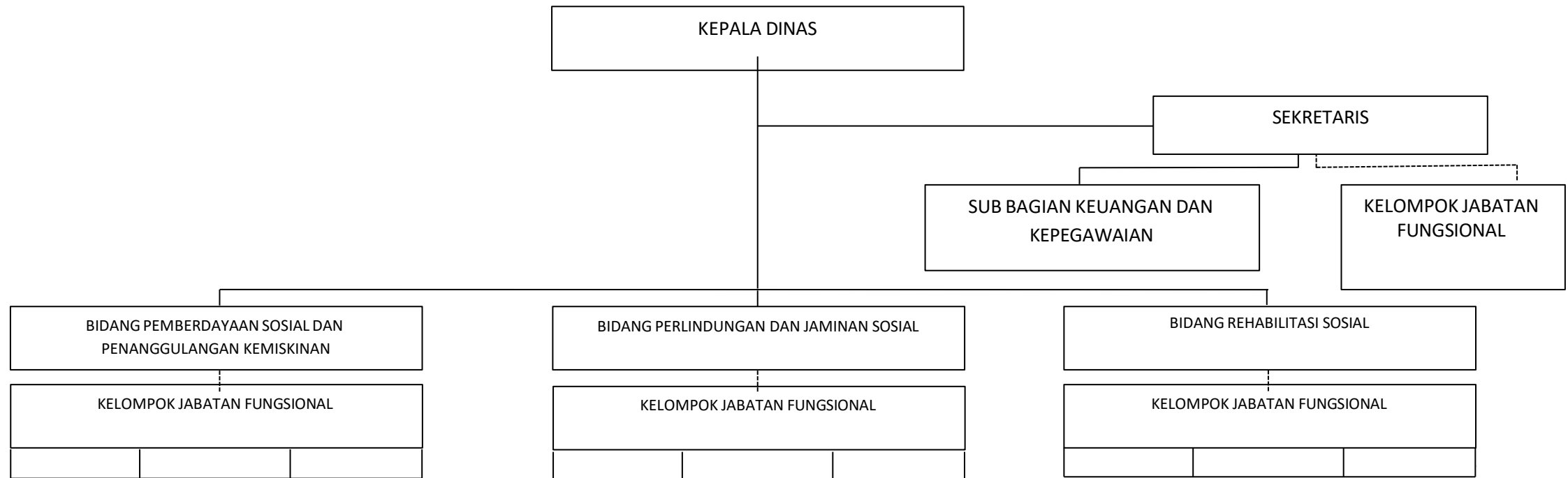
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan dalam lingkup Bidang perlindungan dan jaminan sosial.  
Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- d. merencanakan kebijakan di Bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga dan pengelolaan sumber dana sosial sebagai pedoman kerja;
  - e. merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi urusan perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga dan pengelolaan sumber dana sosial sebagai pedoman kerja;
  - f. sebagai acuan kerja;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan Kepala Bidang lain di lingkup Dinas sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. membagi pelaksanaan tugas meliputi urusan perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga dan pengelolaan sumber dana sosial sebagai pedoman kerja kepada kepala seksi guna kelancaran tugas;
  - i. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada sub koordinator guna kelancaran tugas;
  - j. melaksanakan program dan kegiatan Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - k. mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi calon penerima bantuan sosial;
  - l. mengatur pelaksanaan tugas pokok agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkwalitas dalam Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - m. menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
  - n. melaksanakan pengawasan terkait penyaluran bantuan perlindungan dan jaminan sosial;
  - o. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang perlindungan dan jaminan sosial
  - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - q. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan penanggulangan karier; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan .
5. Bidang rehabilitasi social dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) huruf e dan ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang rehabilitasi Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  - b. menyelenggarakan program dan kegiatan di Bidang rehabilitasi sosial; dan
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup Bidang rehabilitasi sosial;
- Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a) merencanakan kebijakan di Bidang rehabilitasi sosial yang meliputi urusan kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia, rehabilitasi orang dengan kecacatan, korban penyalahgunaan nafsa dan tuna sosial, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam wilayah Kabupaten sebagai pedoman kerja;
  - b) merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup rehabilitasi sosial yang

meliputi urusan kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia, rehabilitasi orang dengan kecacatan, korban penyalagunaan nafsa dan tuna sosial, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sebagai acuan kerja;

- c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan Kepala Bidang lain di lingkup Dinas;
- d) membagi pelaksanaan tugas meliputi urusan kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia, rehabilitasi orang dengan kecacatan, korban penyalagunaan nafsa dan tuna sosial, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas kepada kepala seksi guna kelancaran tugas;
- e) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada sub koordinator lingkup Bidang rehabilitasi sosial guna kelancaran tugas;
- f) melaksanakan program dan kegiatan di Bidang rehabilitasi sosial;
- g) melaksanakan pendataan, bimbingan tehnik dan/atau pelatihan, pemberian rekomendasi ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan pengajuan proposal bantuan usaha, rehabilitasi kerja sama dengan instansi lain bagi penyandang tuna susila, eks, psikotik, terlantar dan gelandangan, serta melakukan koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, waria melalui kegiatan pemulangan;
- h) melaksanakan rapat dan koordinasi ke pemerintah pusat dan instansi terkait di Bidang rehabilitasi sosial;
- i) melaksanakan kegiatan di seksi kesejahteraan anak dan pelayanan lansia yang meliputi pendataan, proses adopsi anak, pendampingan dan/atau monev bagi anak disabilitas, bayi dan/atau anak terlantar, anak apzah, serta anak yang bermasalah dengan hukum;
- j) melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental intelektual, penyandang disabilitas fisik dan sesorik serta melaksanakan pendataan dan pemberian rekomendasi bagi penyandang disabilitas baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
- k) memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkuwalitas dalam lingkup Bidang rehabilitasi sosial;
- l) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang rehabilitasi sosial;
- m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup rehabilitasi sosial;
- n) menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan penanggulangan karier; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU**



 BUPATI MAMUJU,  
SITI SUTINAH SUHARDI

## 2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial memiliki 25 ASN Sedangkan Pegawai Tidak Tetap 38 jadi total keseluruhan yaitu 63

**Tabel Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D.III	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	1	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
5	Jabatan Fungsional	-	-	7	2	9
6	Staff	4	1	6	1	12
<b>Jumlah</b>		4	1	17	6	28

*Sumber Data : Sosial Kab. Mamuju Tahun 2023*

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon**

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	4
4	JABATAN FUNGSIONAL	7
5	ESELON IV	8
6	NON ESELON	10
<b>JUMLAH</b>		

*Sumber Data : Sosial Kab. Mamuju Tahun 2023*

**Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	ASN	18	10
2	Non ASN	18	20

*Sumber Data : Sosial Kab. Mamuju Tahun 2023*

**Jumlah PSKS Tahun 2025**

NO	JENIS PSKS	JUMLAH
1	TAGANA	51
2	PENDAMPING PKH	30
4	TKSK	11
5	PEKSOS	4
6	KARANG TARUNA	24
<b>JUMLAH</b>		<b>120</b>

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan**

No	Jabatan	Golongan											Jumlah
		II				III				IV			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
1	Eselon II											1	
2	Eselon III a									1			
3	Eselon III b									3			
5	Eselon IV a							8	3				
6	Non Eselon	1		1	2	1	3	1	1				
	<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>1</b>	<b>26</b>

*Sumber : Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab.Mamuju Tahun 2021*

**Tabel Jumlah Pegawai (PTT) Dinas Sosial KabupatenMamuju  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		SMA	D3	S1	
1	PTT	15	2	13	30

No	Jabatan	Diklat Struktural				Jumlah
		Prajabatan	Latpim IV	Latpim III	Latpim II	
	Total		7	1	1	9

**Tabel Jumlah Sarana Prasarana Dinas Sosial Kab. Mamuju**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Air Conditioner (AC)	✓		6
2	Laptop	✓		12
3	Meja Kerja	✓		16
4	Kursi Rapat	✓		45
5	Komputer	✓		45
6	Printer	✓		11
7	Lemari Kaca	✓		6
8	Motor Dinas	✓		5
9	Mobil Dinas	✓		1
10	Jaringan Satelit (PKH)	✓		2
11	HT	✓		10
12	TV	✓		1
13	Kursi Kerja	✓		16



## 2.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1,997,418,706					2,204,304,193					110.36				
Belanja Pegawai	1,997,418,706					2,204,304,193					110.36				
Belanja Gaji dan Tunjangan	1,772,954,706					1,976,318,193					111.47				
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	224,464,000					227,986,000					101.57				
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1,424,941,342					1,333,636,217					93.59				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	512,631,172					449,317,329					87.65				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,760,976					22,433,464					80.81				

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	7,055,382					2,055,500					29.13				
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	74,212,000					68,152,000					91.83				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,512,100					20,512,100					100				
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1,403,760					1,403,760					100				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1,740,000					1,740,000					100				
Penyediaan Alat Rumah Tangga	2,009,894					2,009,894					100				
Penyediaan Makanan dan Minuman	28,200,000					28,196,500					99.99				
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,229,000					100,178,801					99.95				
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	62,377,000					62,358,250					99.97				

Penyediaan Jasa Pendukung Adminbistrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	186,354,000					139,500,000					74.86				
Penyediaan Barang dan Alat-alat Kebersihan	777,060					777,060					100				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115,185,750					108,833,714					94.49				
Pengadaan Mebeleur Kantor	3,500,000					3,500,000					100				
Pengadaan Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya	24,000,000					24,000,000					100				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	82,107,750					75,755,714					92.26				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,578,000					5,578,000					100				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	45,872,720					44,872,720					97.82				
Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD, LAKIP, dan TAPKIN	7,994,000					7,994,000					100				

<b>Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan</b>	<b>12,720,000</b>					<b>12,720,000</b>					<b>100</b>				
<b>Penyusunan RKA-DPA SKPD</b>	<b>20,804,720</b>					<b>19,804,720</b>					<b>95.19</b>				
<b>Penyusunan Rencana Kerja SKPD</b>	<b>4,354,000</b>					<b>4,354,000</b>					<b>100</b>				
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat</b>	<b>79,494,780</b>					<b>76,243,780</b>					<b>95.91</b>				
<b>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</b>	<b>12,790,880</b>					<b>12,757,880</b>					<b>99.74</b>				
<b>Money Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Bantuan Sosial Beras Sejahtera</b>	<b>8,733,000</b>					<b>8,733,000</b>					<b>100</b>				
<b>Update data Verifali data BDT</b>	<b>6,021,500</b>					<b>6,021,500</b>					<b>100</b>				
<b>Pelayanan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin</b>	<b>51,949,400</b>					<b>48,731,400</b>					<b>93.81</b>				
<b>Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>520,400,950</b>					<b>505,598,704</b>					<b>97.16</b>				

<b>Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi rumah kesejahteraan sosial bagi PMKS lanjut usia (LU)</b>	<b>38,045,000</b>					<b>37,244,754</b>					<b>97.90</b>				
<b>penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</b>	<b>481,738,050</b>					<b>467,736,050</b>					<b>97.09</b>				
<b>Monitoring dan Evaluasi Data Migran</b>	<b>617,900</b>					<b>617,900</b>					<b>100</b>				
<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	<b>1,698,800</b>					<b>1,698,800</b>					<b>100</b>				
<b>Pendataan penyandang disabilitas dan penyakit kejiwaan</b>	<b>1,698,800</b>					<b>1,698,800</b>					<b>100</b>				
<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>	<b>7,700,720</b>					<b>7,700,720</b>					<b>100</b>				
<b>Penyediaan Makan Minum bagi Panti Asuhan / Panti Jompo</b>	<b>7,700,720</b>					<b>7,700,720</b>					<b>100</b>				
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan</b>	<b>115,086,450</b>					<b>112,500,450</b>					<b>97.75</b>				

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Progrma Keluarga Harapan	85,803,450					83,217,450					96.99				
Pemberdayaan Tenaga TKSK	29,283,000					29,283,000					100				
Program Pelestarian, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	26,870,000					26,870,000					100				
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	26,870,000					26,870,000					100				
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah		2,395,498,298	2,698,152,250	2,841,770,315	2,862,686,119		2,357,688,458	2,643,458,801	2,720,426,802	1,892,445,651		98.42	97.97	95.73	66.11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		35,164,400	26,893,040	13,732,000	13,042,800		35,164,400	26,893,040	13,732,000	7,636,800		100.00	100.00	100.00	58.55
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4,566,000	4,165,440	3,193,200	1,652,800		4,566,000	4,165,440	3,193,200	1,652,800		100.00	100.00	100.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		8,105,600	5,164,000	2,193,200	2,826,000		8,105,600	5,164,000	2,193,200	1,326,000	-	100.00	-	100.00	46.92

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		6,744,000	4,104,000	2,233,200	2,754,000		6,744,000	4,104,000	2,233,200		-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		<b>2,416,800</b>	<b>2,125,800</b>	<b>1,193,200</b>	<b>1,290,000</b>		<b>2,416,800</b>	<b>2,125,800</b>	<b>1,193,200</b>	<b>1,290,000</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1,500,000	1,945,800	1,726,000	1,152,000		1,500,000	1,945,800	1,726,000			100.00	100.00	100.00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5,916,000	4,694,000	3,193,200	1,601,200		5,916,000	4,694,000	3,193,200	1,601,200		-	-	-	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<b>5,916,000</b>	<b>4,694,000</b>		<b>1,766,800</b>		<b>5,916,000</b>	<b>4,694,000</b>		<b>1,766,800</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,122,702,282	2,296,421,810	2,355,707,711	2,470,514,945		2,096,283,742	2,258,658,922	2,246,388,792	1,644,347,628		<b>98.76</b>	<b>98.36</b>	<b>95.36</b>	<b>66.56</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,037,566,282	2,251,474,210	2,310,293,811	2,427,367,487		2,027,647,742	2,213,711,322	2,200,974,892	1,619,107,448		<b>99.51</b>	<b>98.32</b>	<b>95.27</b>	<b>66.70</b>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		21,600,000	840,000	1,034,800			12,600,000	840,000	1,034,800			<b>58.33</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD		46,160,000	38,395,600	43,755,100	41,917,458		38,660,000	38,395,600	43,755,100	24,368,500		<b>83.75</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>58.13</b>

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun		17,376,000	5,712,000	624,000	1,230,000		17,376,000	5,712,000	624,000	871,680		100.00	100.00	100.00	70.87
<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>		21,300,000	4,392,000	3,852,000	4,278,000		13,800,000	4,392,000	3,852,000	2,368,000		64.79	100.00	100.00	55.35
Pengamanan Barang Milik Daerah		21,300,000	4,392,000	3,852,000	4,278,000		13,800,000	4,392,000	3,852,000	2,368,000		64.79	100.00	100.00	55.35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					12,803,600					1,603,560					12.52
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					10,880,000										-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1,923,600					1,603,560					83.36
Administrasi Umum Perangkat Daerah		83,026,792	139,659,496	193,072,776	154,713,350		83,022,768	138,546,350	192,187,570	104,256,105		100.00	99.20	99.54	67.39
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1,672,500	1,970,000	1,500,000			1,672,500	1,922,000	964,000			100.00	97.56	64.27
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13,559,792	15,229,996	23,500,000			13,558,150	15,229,700	23,500,000			99.99	100.00	100.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6,780,000	7,342,000	4,536,000	3,402,000		6,780,000	7,342,000	4,536,000	2,190,66		100.	100.0	100.0	64.39



		7,680,000	59,472,000	59,214,000	57,588,000		6,360,000	47,890,000	54,895,110	36,985,994		82.81	80.53	92.71	64.23
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												99.38	96.96	97.95	72.17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		27,776,000	31,062,000	34,367,600	37,767,600		27,410,700	29,570,172	33,404,400	29,889,740		98.68	95.20	97.20	79.14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		26,544,000	31,199,200	33,328,800	27,842,000		26,544,000	30,790,000	32,723,000	17,837,238		100.00	98.69	98.18	64.07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4,260,000	4,550,000	8,900,000	8,200,000		4,260,000	4,420,000	8,900,000	5,542,000		100.00	97.14	100.00	67.59
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		401,363,000	1,214,277,480				401,361,000	410,872,480	1,318,214,400			100.00	33.84		
Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota		401,363,000	1,214,277,480	1,320,048,800			401,361,000	410,872,480	1,318,214,400			100.00	33.84	99.86	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan		14,539,000	46,251,000	83,084,000			14,539,000	46,077,000	82,284,000			100.00	99.62	99.04	

Kab/Kota															
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		375,639,000		1,213,967,000			375,637,000		1,213,835,000			100.00	#DIV/0!	99.99	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		11,185,000	1,168,026,480	22,997,800			11,185,000	364,795,480	22,095,400			100.00	31.23	96.08	
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>		10,002,200	61,931,680	197,184,400	308,225,120		9,692,200	61,771,280	196,913,200	150,374,200		96.90	99.74	99.86	48.79
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial		2,138,800	30,455,000	165,527,200	143,468,720		2,138,800	30,346,800	165,410,000	64,385,200		100.00	99.64	99.93	44.88
Penyediaan Permakanan		2,138,800	30,455,000	165,527,200	63,672,720		2,138,800	30,346,800	165,410,000	34,721,400		100.00	99.64	99.93	54.53
Penyediaan Sandang					25,675,000					14,605,400					56.89
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					47,256,000					10,439,600					22.09

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					6,865,000					4,618,800					<b>67.28</b>
Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial		7,863,400	31,476,680	31,657,200	164,756,400		7,553,400	31,424,480	31,503,200	85,989,000		96.06	99.83	99.51	52.19
Penyediaan Permakanan				25,894,200					25,756,200						99.47
Penyediaan Alat Bantu			18,945,000					18,917,000					99.85	#DIV/0!	
Pemberian Layanan Rujukan		7,863,400	12,531,680	5,763,000			7,553,400	12,507,480	5,747,000			96.06	99.81	99.72	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					48,231,400					28,602,000					59.30
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					116,525,000					57,387,000					49.25
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		118,380,440	1,562,591,600	141,254,000	627,315,680		110,810,240	1,504,061,600	140,038,000	594,905,000		93.61	96.25	99.14	94.83
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota		118,380,440	1,562,591,600	141,254,000	627,315,680		110,810,240	1,504,061,600	140,038,000	594,905,000		93.61	96.25	99.14	94.83

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota		118,380,440	172,741,600	15,664,000	7,435,080		110,810,240	172,711,600	15,664,000	5,032,000		93.61	99.98	100.00	67.68
Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		-	1,389,850,000	125,590,000			-	1,331,350,000	124,374,000				95.79	99.03	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					619,880,600					589,873,000					95.16
Program Penanganan Bencana		289,252,200	272,937,200	444,713,000	454,329,920		263,750,327	270,937,200	438,472,400	267,396,000		91.18	99.27	98.60	58.86
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/kota		289,252,200	272,937,200	67,938,400	454,329,920		263,750,327	270,937,200	67,178,400	267,396,000		91.18	99.27	98.88	58.86
Penyediaan Permakanan		289,252,200	272,937,200	67,938,400	454,329,920		263,750,327	270,937,200	67,178,400	267,396,000		91.18	99.27	98.88	58.86
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				376,774,600					371,294,000					98.55	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				376,774,600					371,294,000					98.55	
Program Pngelolaan Taman Makam Pahlawan			7,158,000	8,122,000	6,800,000			7,158,000	8,050,000	4,800,000			100.00	99.11	70.59
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota			7,158,000	8,122,000	6,800,000			7,158,000	8,050,000	4,800,000			100.00	99.11	70.59
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			7,158,000	8,122,000	6,800,000			7,158,000	8,050,000	4,800,000			100.00	99.11	70.59

### 2.1.5 Kelompok Sasaran Kinerja

Sasaran Kinerja adalah target atau tujuan yang ini capai, pada Dinas Sosial Kabupaten target kinerja sasaran sebagai Tabel berikut :

**Tabel Kelompok Sasaran Layanan**

<b>No</b>	<b>Bidang</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Kelompok Sasaran</b>
<b>1</b>	<b>Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Rekomendasi Pengusulan BPJS PBPU Pemda</b>	<b>Masyarakat</b>
		<b>Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>Masyarakat</b>
<b>2</b>	<b>Bidang Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Pelayanan Anak</b>	<b>Masyarakat Golongan PPKS</b>
		<b>Pelayanan Disabilitas</b>	<b>Masyarakat Golongan PPKS</b>
		<b>Pelayanan Lansia</b>	<b>Masyarakat Golongan PPKS</b>
		<b>Pelayanan Kelompok Rentan</b>	<b>Masyarakat Golongan PPKS</b>
<b>3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Pelayanan Data DTESN</b>	<b>Masyarakat</b>
		<b>Rekomendasi Kube dan UEP</b>	<b>Masyarakat Yang Terdata di DTESN yang masuk Desil 1-4</b>

## 2.1.6 Mitra Perangkat Daerah

**Tabel Mitra Perangkat Daerah**

<b>No</b>	<b>Mitra Perangkat Daerah</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Dukungan Kinerja</b>
1	Dinas Kesehatan	Pendaftaran BPJS Bantuan PBPUPemda	Penyedia Anggaran Peserta PBPUPemda
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pendampingan ABH (Anak Berhadapan Hukum)	Ketersediaan laporan Sosial ABH yang didampingi
2	Polresta	Pendampingan ABH (Anak Berhadapan Hukum)	Ketersediaan laporan Sosial ABH yang didampingi
3	Kemenkumham	Pendampingan ABH (Anak Berhadapan Hukum)	Ketersediaan laporan Sosial ABH yang didampingi
4	LKS dan LKSA	Rekomendasi Pengaktifan dan Akreditasi	Pengawasan dan Evaluasi Lembaga LKS dan LKSA

### 2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Tabel Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jika ada)

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
<i>TIDAK ADA</i>			

## 2.1.8 Kerjasama

**Tabel Kerja Sama yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
	<i>BPJS Kesehatan</i>	<i>Layanan Kepesertaan BPJS PBPU Pemda</i>	<i>Pengaktifan/Penonaktifan Kepesertaan BPJS PBPU Pemda</i>
	<i>Dinas Dukcapil</i>	<i>Layanan Data PPKS</i>	<i>Validasi Data Layanan PPKS</i>

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

### 2.2.1 Permasalahan

**Tabel Permasalahan**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Belum Optimalnya Penangana Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Basis data kemiskinan dan PPKS belum sepenuhnya valid,update dan terintegrasi
2	Penanganan PPKS	Belum Optimalnya Penanganan PPKS	Tingginya ketergantungan Madsyarakat terhadap Bantuan Sosial
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Belum Optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Kapasitas Kelembagaan Dinas Sosial Masih terbatas (SDM, Anggaran , Sarana dan Prasarana)
4	Kurangnya SDM	Belum optimalnya Peran Pemberdayaan Sosial dan Penanganan PPKS	Keterbatasan Anggaran, Sarana dan Prasarana dan SDM Pendamping Sosial

2.2.2 Isu Strategis

**Tabel Isu Strategis  
Perumusan Isu Strategis**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1.Dukungan PSKS dan Kelembagaan Sosial	Masih Tingginya angka kemiskinan dan kerentanan Sosial	Keterbatasan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Sumber Daya Manusia untuk mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Perubahan Iklim dan Ancaman Bencana	Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial (Kemensos) 2025-2029 berfokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui 9 arah kebijakan strategis, termasuk penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), perluasan kerja sama lintas sektor, peningkatan kompetensi pilar sosial, penjaminan bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pengembangan Sekolah Rakyat	1.Jangkauan Pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PPKS 2.Sinergi antar Lembaga yang belum terbangun 3.Kebijakan dalam penanganan PPKS belum maksimal 4.Dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum optimal 5.Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang masih terbatas 6.Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum maksimal	Isu Strategis: Perlunya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kerentanan sosial secara berkelanjutan melalui intervensi yang tepat sasaran, integratif, dan berorientasi pemberdayaan

<p>2. Dukungan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos)</p>	<p>Masih banyaknya PPKS yang belum tertangani secara Optimal</p>	<p>Belum Optimalnya Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mamuju</p>		<p>RPJMN 2025-2029 Penurunan Kemiskinan: Melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>1.Pemetaan dan pemutakhiran data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) berbasis sistem informasi terpadu 2.Penguatan sistem layanan terpadu untuk kelompok rentan 3.Pengembangan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbasis kecamatan/desa 4.Pemberdayaan sosial bagi keluarga rentan melalui pelatihan keterampilan dan</p>	<p>Penguatan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif, inklusif, serta peningkatan cakupan layanan bagi PPKS</p>
	<p>Belum Optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS</p>					<p>Peningkatan efektivitas program perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif, terintegrasi, serta mampu menjangkau kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dll</p>

	Belum optimalnya Peran Pemberdayaan Sosial dan Penanganan PPKS				<p>kewirausahaan sosial</p> <p>5.Penguatan sistem layanan rujukan dan penjangkauan terpadu bagi kelompok marginal</p> <p>6.Penguatan akses pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat bagi anak putus sekolah dan kelompok rentan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial</p> <p>7.Pengembangan shelter sementara untuk korban bencana dan kekerasan</p> <p>8.Pemberian bantuan sosial berbasis kebutuhan spesifik</p>	<p>Penguatan peran pemberdayaan sosial berbasis komunitas dan peningkatan kemandirian PPKS melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.</p>
--	--	--	--	--	---	--

### **BAB III**

#### **TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai, maka tiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya, dapat dilihat pada tabel berikut :

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel Cascading**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/	Target Tahun						Ket.
			Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
UUD No.9 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial	70%	75%	80%	85%	90%	100%	
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS serta keluarga miskin/rentan	1.Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar	65%	70%	75%	80%	85%	90%	
			2. Persentase keluarga miskin/rentan yang memperoleh akses layanan kesejahteraan sosial	90%	91%	92%	93%	94%	95%	

		Meningkatnya kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana di bidang kesejahteraan sosial serta terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	1.Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			2. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	70%	75%	80%	85%	90%	95%	
			3.Persentase Taman makam Pahlawan yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terselenggaranya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Akip OPD	BB (73.32)	BB (73.32)	BB (73.32)	BB (73.32)	BB (73.32)	BB (73.32)	

3.2 Penentuan Strategi

Tabel Penentuan Strategi

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1			
1	<p><b>Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan dan Kerentanan Sosial</b></p>	<p><b>Tujuan:1.Menurunnya Angka Kemiskinan Secara Berkelanjutan 2. mengurangi kerentanan sosial masyarakat</b>  <b>Sasaran : 1.Terwujudnya peningkatan Kesejahteraan masyarakat miskin</b>  <b>2.berkurangnya jumlah keluarga rentan miskin</b></p>	<p><b>meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan dan kerentanan sosial</b></p>
2	<p><b>Belum Optimalnya Penanganan PPKS</b></p>	<p><b>Tujuan:1. Memperkuat sistem pendataan dan pelayanan PPKS 2.memastikan seluruh PPKS mendapatkan layanan yang memadai,</b>  <b>Sasaran : 1.Tersedianya data PPKS yang akurat,mutakhir, dan terintegrasi</b>  <b>2.peningkatan cakupan layanan PPKS secara merata</b></p>	<p><b>Memperkuat Data PPKS agar lebih akurat mutakhir dan terintegrasi</b></p>

3	Belum Optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	<p><b>Tujuan:1.Mengoptimalkan Perlindungan Sosial bagi PPKS 2.Memperluas akses Jaminan Sosial</b></p> <p><b>Sasaran : 1. Meningkatkan jumlah PPKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.Terbangunnya Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial</b></p>	<p><b>Kapasitas Kelembagaan Dinas Sosial Masih terbatas (SDM, Anggaran , Sarana dan Prasarana)</b></p>
4	Belum optimalnya Peran Pemberdayaan Sosial dan Penanganan PPKS	<p><b>Tujuan:1.Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat 2.Menguatkan Peran Pendamping Sosial dalam Penanganan PPKS,</b></p> <p><b>Sasaran :</b></p> <p><b>1.Peningkatan Kapasitas SDM Pendamping Sosial 2.Tersedianya sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk Pemberdayaan Sosial</b></p>	<p><b>Keterbatasan Anggaran, Sarana dan Prasarana dan SDM Pendamping Sosial</b></p>

### 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

**Tabel Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	<p>UUD No.09 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas</p>	<p>1.Masih tingginya jumlah penduduk miskin                  2.Data kemiskinan (DTESN) belum sepenuhnya valid dan terintegrasi                  3.Rendahnya akses keluarga miskin terhadap modal usaha dan lapangan kerja                  4.Ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial tanpa kemandirian ekonomi</p>	<p>1.Penguatan program bantuan sosial tepat sasaran                  2.Pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ekonomi produktif                  3.Sinergi data terpadu kesejahteraan sosial (DTESN) untuk intervensi kebijakan</p>	

			<p>1.Banyaknya anak terlantar, lansia miskin, dan penyandang disabilitas yang belum terlayani optimal</p> <p>2.belum tersedianya rumah singgah (Shelter)</p> <p>3.Minimnya tenaga profesional pekerja sosial</p> <p>4.Stigma sosial terhadap kelompok rentan masih tinggi</p>	<p>1.Rehabilitasi sosial anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, dan korban kekerasan</p> <p>2.Pengembangan layanan panti dan balai sosial</p> <p>3.Penguatan program perlindungan anak dan pemberdayaan disabilitas</p>	
			<p>1.Kapasitas aparatur dan pekerja sosial belum merata</p> <p>2.Sistem layanan belum sepenuhnya berbasis teknologi/digital</p> <p>3.Keterbatasan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan sosial</p> <p>4.Anggaran untuk penguatan pelayanan sosial masih terbatas</p>	<p>1.Pengembangan potensi kelembagaan masyarakat (Karang Taruna, LKS, PKH, dll.)</p> <p>2.Pelatihan kader sosial dan relawan kesejahteraan sosial</p> <p>3.Penguatan peran masyarakat dalam penanganan masalah sosial</p>	

			<p>1.Kelembagaan sosial masyarakat (Karang Taruna, LKS, PKH, dll.) belum berfungsi optimal</p> <p>2.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial</p> <p>3.Keterbatasan pelatihan dan</p> <p>4.pembinaan kader sosial</p> <p>5.Masih rendahnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat</p>	<p>1.Pengembangan potensi kelembagaan masyarakat (Karang Taruna, LKS, PKH, dll.)</p> <p>2.Pelatihan kader sosial dan relawan kesejahteraan sosial</p> <p>3.Penguatan peran masyarakat dalam penanganan masalah sosial</p>	
--	--	--	---	---	--

### 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

**Tabel Pentahapan Renstra Perangkat Daerah**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1. Validasi & pemutakhiran DTSEN 2. Pemetaan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) 3. Peningkatan kapasitas aparatur & pekerja sosial 4. Penyusunan regulasi/standar layanan sosial	1. Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran 2. Peningkatan sarana dan prasarana panti/rumah singgah 3. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak, lansia, dan disabilitas 4. Penguatan peran TKSK dan kader sosial	1. Pengembangan Karang Taruna, LKS, dan kelembagaan sosial lainnya 2. Pelatihan usaha ekonomi produktif untuk keluarga miskin 3. Program pembinaan keluarga sejahtera 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial	1. Digitalisasi layanan sosial (aplikasi, sistem informasi) 2. Kolaborasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi) 3. Inovasi model pemberdayaan keluarga berbasis komunitas 4. Penguatan monitoring & evaluasi program sosial	1. Pencapaian target penurunan kemiskinan dan PPKS 2. Terwujudnya keluarga sejahtera, produktif, dan mandiri 3. Penguatan ketahanan sosial masyarakat melalui komunitas 4. Pelayanan sosial yang cepat, tepat, transparan, dan berkelanjutan

**BAB IV**  
**PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG**  
**URUSAN**

Dalam melaksanakan sasaran dan indikator sasaran yang sudah diuraikan pada Bab III, ditetapkan rencana program pokok Dinas Sosial Kabupaten Mamuju periode tahun 2025-2029 Pada Tabel sebagai

4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
UUD No.09 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Sasaran RPJM Meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat dan Keluarga yang berkualitas	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat				Indeks Kesejahteraan Sosial		
		1.Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS serta keluarga miskin/rentan			1.Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar		

					2. Persentase keluarga miskin/rentan yang memperoleh akses layanan kesejahteraan sosial		
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis di luar panti		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terlaksananya penjangkauan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau	KEG.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG : Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

				<p>Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>SUBKEG.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</p>	
				<p>Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>SUBKEG.Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p>	
				<p>Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>SUBKEG : Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</p>	

				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kotaa	SUBKEG.Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

				(Output Sub Kegiatan) Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Pemberian Layanan Rujukan	
				Terlaksananya penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	KEG Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG. Pemberian Layanan Kedaruratan	

			Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin dan rentan dalam program jaminan sosial daerah		Jumlah masyarakat miskin/rentan yang difasilitasi kepesertaan jaminan sosial (BPJS PBU Pemd)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Tersedianya sistem pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin yang masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	Keg 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	SUBKEG.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.3 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	KEG.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG: Penyediaan Makanan	

				Terlaksananya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Jumlah Pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	KEG. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
		2.Meningkatnya kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana di bidang kesejahteraan sosial serta terpeliharanya Taman Makam Pahlawan			1.Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi sesuai standar		
					2. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi		
					3.Persentase Taman makam Pahlawan yang terpelihara		

			Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial di luar panti melalui pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial sesuai standar		Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Meningkatnya PSKS dalam penanganan PPKS	Jumlah PSKS masyarakat, lembaga, perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PPKS	KEG. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	

				Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terpeliharanya kelestarian, kerapian, dan kelayakan Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan.		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terpeliharanya TMP secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan Negara	Jumlah TMP yang terpelihara	KEG.Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	SUBKEG.Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	

		3.Terselenggaranya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			Nilai Akip OPD		
			Terselenggaranya target kinerja urusan pemerintahan daerah secara akuntabel		Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	KEG.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUBKEG.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SUBKEG.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SUBKEG.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	SUBKEG.Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SUBKEG.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SUBKEG.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUBKEG.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Pemerintah Daerah	SUBKEG.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	KEG.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SUBKEG.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SUBKEG.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	SUBKEG.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Administrasi Barang milik Daerah OPD	KEG.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SUBKEG.Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

				Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pemenuhan standar pelayanan administrasi kepegawaian	KEG.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SUBKEG.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SUBKEG.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	KEG.Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SUBKEG.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SUBKEG.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SUBKEG.Fasilitasi Kunjungan Tamu	

				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUBKEG.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUBKEG.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	KEG.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	SUBKEG.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	SUBKEG.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	KEG.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SUBKEG.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SUBKEG.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya sarana dan prasarana milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD penunjang yang dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	KEG.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SUBKEG.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SUBKEG.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SUBKEG.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUBKEG.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

**Tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Outcome/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>URUSAN BIDANG SOSIAL</b>														
<b>Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terselenggaranya target kinerja urusan pemerintahan daerah secara akuntabel</b>	<b>Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	100	4,010,990,529	100	4,167,260,298	100	4,167,260,298	100	4,167,260,298	100	4,167,260,298	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100	100	13,939,300	100	17,584,000	100	17,584,000	100	18,814,000	100	18,814,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2,054,000	2	2,654,000	2	2,654,000	2	2,654,000	2	2,654,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2,714,500	1	3,772,000	1	3,772,000	1	3,772,000	1	3,772,000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2,784,000	1	3,844,000	1	3,844,000	1	3,844,000	1	3,844,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1,422,000	1	1,886,000	1	1,886,000	1	1,886,000	1	1,886,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1,350,500	1	1,814,000	1	1,814,000	1	1,814,000	1	1,814,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	1,660,000	2	1,660,000	2	1,660,000	2	1,660,000	2	1,660,000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	1,954,000	4	1,954,000	2	1,954,000	2	1,954,000	2	1,954,000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Pemerintah Daerah								112	1,230,000	112	1,230,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	2,803,296,528	100	2,804,629,776	100	2,804,629,776	100	2,804,629,776	100	2,804,629,776
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	27	2,731,990,530	27	2,747,105,299	27	2,747,105,299	27	2,747,105,299	27	2,747,105,299
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	70,003,498	12	54,472,977	12	54,472,977	12	54,472,977	12	54,472,977
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	12	1,302,500	12	3,051,500	12	3,051,500	12	3,051,500	12	3,051,500

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Administrasi Barang milik Daerah OPD	1	1	4,278,000	1	4,278,000	1	4,278,000	1	4,278,000	1	4,278,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	4,278,000	1	4,278,000	1	4,278,000	1	4,278,000	1	4,278,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pemenuhan standar pelayanan administrasi kepegawaian	100	100	2,192,400	100	13,099,400	100	13,099,400	100	11,869,400	100	11,869,400
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	27	10,999,400						
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	2,192,400	1	2,100,000	1	13,099,400	1	11,869,400	1	11,869,400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	87,332,775	100	155,171,400	100	155,171,400	100	155,171,400	100	155,171,400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	3,294,000	1	3,402,000	1	3,402,000	1	3,402,000	1	3,402,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	6,762,000	1	6,762,000	1	6,762,000	1	6,762,000	1	6,762,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	23,800,000	1	29,260,000	1	29,260,000	1	29,260,000	1	29,260,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	51,976,775	12	114,247,400	12	114,247,400	12	109,247,400	12	109,247,400
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-					1	5,000,000	1	5,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	-	100	109,800,000	100	46,600,000	100	46,600,000	100	46,600,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	1	109,800,000	1	36,600,000	1	36,600,000	1	36,600,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		-			1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	110,307,824	100	111,477,824	100	111,477,824	100	111,477,824	100	111,477,824
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	55,119,824	12	56,289,824	12	56,289,824	12	56,289,824	12	56,289,824

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	55,188,000	12	55,188,000	12	55,188,000	12	55,188,000	12	55,188,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD penunjang yang dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	100	100	91,651,352	100	75,835,600	100	75,835,600	100	75,835,600	100	75,835,600	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	37,767,000	4	37,767,000	4	37,767,000	4	37,767,000	4	37,767,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	29,365,852	1	29,368,000	1	29,368,000	1	29,368,000	1	29,368,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	24	8,700,000	24	8,700,000	24	8,700,000	24	8,700,000	24	8,700,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	15,818,500		-		-		-		-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	.Meningkatnya kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana di bidang kesejahteraan sosial serta terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	75	75	33,809,000	80	75,583,000	80	138,783,000	85	138,783,000	85	138,783,000	Program Prioritas RPJMD

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya PSKS dalam penanganan PPKS	Jumlah PSKS masyarakat, lembaga, perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PPKS	102	102	33,809,000	102	75,583,000	102	138,783,000	102	138,783,000	102	138,783,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50	11,420,000	50	46,261,000	50	63,200,000	50	63,200,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6	64,163,000	6	46,261,000	6	11,420,000	6	11,420,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	102	102	33,809,000	102	-	102	46,261,000	102	64,163,000	102	64,163,000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis (gepeng) melalui layanan rehabilitasi sosial berbasis luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100	100	104,458,100	100	126,607,740	100	126,607,740	100	126,607,740	100	126,607,740

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya penjangkauan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau	35	50	95,354,100		106,703,740		106,703,740		106,703,740		106,703,740	
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	35	50	46,651,800		58,001,440		58,001,440		58,001,440		58,001,440	Kemiskinan / SPM
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35	50	16,128,000		16,128,000		16,128,000		16,128,000		16,128,000	Kemiskinan / SPM
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota									25,070,300		25,070,300	Kemiskinan / SPM
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30	50	25,070,300		25,070,300		25,070,300		-		-	Kemiskinan / SPM
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	12	7,504,000		7,504,000		7,504,000		7,504,000		7,504,000	Kemiskinan / SPM

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	6	6	9,104,000	6	19,904,000	6	19,904,000	6	19,904,000	6	19,904,000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	8 orang,49 Kasus	8 orang,49 Kasus	9,104,000	8 orang,49 Kasus	19,904,000	8 orang,49 Kasus	19,904,000	8 orang,49 Kasus	19,904,000	8 orang,49 Kasus	19,904,000	Kemiskinan / SPM
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin dan rentan dalam program jaminan sosial daerah	Jumlah masyarakat miskin/rentan yang difasilitasi kepesertaan jaminan sosial (BPJS PBPUPemda)	100	100	341,708,000	100	184,067,000	100	184,067,000	100	184,067,000	100	184,067,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin yang masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	25250	1300	341,708,000	1500	184,067,000	25250	184,067,000	25250	184,067,000	25250	184,067,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25250	1300	18,307,000	25250	15,876,800	25250	15,876,800	25250	15,876,800	25250	15,876,800	Kemiskinan / SPM dan Program Prioritas Kepala Daerah (Energik: 1.Kesehatan Gratis (UHC)

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8025	8025	11,557,000	8025	162,992,200	8025	162,992,200	8025	162,992,200	8025	162,992,200	Kemiskinan / SPM
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	85	334,344,000		5,198,000		5,198,000		5,198,000		5,198,000	Kemiskinan / SPM
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	100	100	375,533,260	100	481,852,108	100	481,852,108	100	481,852,108	100	481,852,108	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	800	800	91,118,400	800	91,673,208	800	91,673,208	800	91,673,208	800	91,673,208	
Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	800	800	91,118,400	800	91,673,208		91,673,208	800	91,673,208	800	91,673,208	Kemiskinan / SPM
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Jumlah Pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	21	20	284,414,850	20	390,178,900	20	390,178,900	20	390,178,900	20	390,178,900	

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21	20	284,414,850	20	390,178,900	20	390,178,900	20	390,178,900	20	390,178,900
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpeliharanya kelestarian, kerapian, dan kelayakan Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan.	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	100	19,984,000	100	7,274,450	100	7,274,450	100	7,274,450	100	7,274,450
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya TMP secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan Negara	Jumlah TMP yang terpelihara	22 Makam	22 Makam	19,984,000	22	7,274,450	22	7,274,450	22	7,274,450	22	7,274,450
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	22 Makam	22 Makam	19,984,000	22	7,274,450	22	7,274,450	22	7,274,450	22	7,274,450

4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

**Tabel Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Outcome Program		Bisa Ditagging Program Unggulan Kepala Daerah
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis di luar panti	Penyediaan Permakanan	SPM
			Penyediaan Sandang	SPM
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	SPM
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	SPM
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	SPM
			Pemberian layanan Rujukan	SPM
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	SPM

	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kepesertaan masyarakat miskin dan rentan dalam program jaminan sosial daerah	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	BPJS PBPUPemda
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Stunting	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi masyarakat (UEP)			Kemiskinan	
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Penyediaan Makanan	SPM
	Program Pemberdayaan Sosial	.Meningkatnya kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana di bidang kesejahteraan sosial serta terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Prioritas RPJMD

4.4 Indikator Kinerja Utama

Tabel Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									Formula
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	70%	75%	80%	85%	90%	100%	
	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar	Persen	65%	70%	75%	80%	85%	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan sesuai standar: 79056 orang</li> <li>• Jumlah total PPKS yang membutuhkan layanan: 120.978 orang</li> </ul> Persentase = $(79056 \div 120.978) \times 100\% = 65\%$
	Persentase keluarga miskin/rentan yang memperoleh akses layanan kesejahteraan sosial	Persen	90%	91%	92%	93%	94%	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga miskin/rentan yang memperoleh layanan: 106.068</li> <li>• Total keluarga miskin/rentan yang terdata: 117580</li> </ul> Persentase = $(106.068 \div 117580) \times 100\% = 90\%$
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga kesejahteraan sosial kompeten: 54 orang</li> <li>• Total tenaga kesejahteraan sosial terdata: 54 orang</li> </ul> Persentase = $(54 \div 54) \times 100\% = 100\%$

	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	Persen	70%	75%	80%	85%	90%	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah LKS Aktif Tahun 2025:10</li> <li>• Jumlah LKS Terakreditasi Tahun 2025:7 100 Persentase = <math>(7 / 10) \times 100\% = 70\%</math></li> </ul>
	Persentase Taman makam Pahlawan yang terpelihara	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase TMP Terpelihara= $\frac{\text{Jumlah Total TMP}}{\text{Jumlah TMP yang Terpelihara}} \times 100\%$

Tabel Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	IKU								Formula
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti</p> $\times 100\%$ <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</p>
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</p> $\times 100\%$ <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini adalah sebuah dokumen rencana kerja Dinas Sosial untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan bidang Sosial. Dengan demikian, maka seluruh aparatur Dinas Sosial dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan tahunan Dinas Sosail atau yang lazim disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) harus memedomani isi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2030 tergantung pada komitmen aparatur Dinas Sosial dan *stakeholders*. Oleh karena itu pemerintah dan *stakeholders* diharapkan dapat bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan bidang Sosial.

Sekalipun Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2030 ini merupakan acuan yang harus dipedomani, namun dokumen ini harus tetap memerlukan penyempurnaan guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam bidang Sosial.

Mamuju, 14 Oktober 2025  
Kepala Dinas,



**IKHSAN LASAMI, ST.MM**  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP.197008282001121007